

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
YOGYAKARTA**

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2023 (Audited)

Jl. Janti No. 66 Banguntapan

Bantul - DI Yogyakarta 55198

Telp. (0274) 520502 Fax. (0274) 581675

e-mail : jogjakarta@ptun.org



**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA**

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 (Audited)

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Janti No. 66 Banguntapan

Telp. (0274) 520502 Fax. (0274) 581675

Bantul - DI Yogyakarta 55198

e-mail : jogjakarta@ptun.org

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bantul, Mei 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

BUDI SURYANA, S.H.
NIP.196702131988031002



DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	8
I. Laporan Realisasi Anggaran	11
II. Neraca	14
III. Laporan Operasional	17
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	20
V. Catatan atas Laporan Keuangan	22
A. Penjelasan Umum	22
A.1. Dasar Hukum	22
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	23
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	24
A.4. Basis Akuntansi	24
A.5. Dasar Pengukuran	25
A.6. Kebijakan Akuntansi	25
(1.) Pendapatan LRA	25
(2.) Pendapatan LO	26
(3.) Belanja	26
(4.) Beban	26
(5.) Aset	27
a. Aset Lancar	27
b. Aset Tetap	28
c. Penyusutan Aset Tetap	29
d. Piutang Jangka Panjang	30
e. Aset Lainnya	30
(6.) Kewajiban	31
(7.) Ekuitas	31
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	32

B.1.	Pendapatan	32
B.2.	Belanja	33
B.2.1.	Belanja Pegawai	34
B.2.2.	Belanja Barang	35
B.2.3.	Belanja Modal	36
B.2.3.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36
C.	Penjelasan atas Pos-pos Neraca	37
Aset Lancar		37
C.1.	Persediaan	37
Aset Tetap		37
C.2.	Tanah	38
C.3.	Peralatan dan Mesin	39
C.4.	Gedung dan Bangunan	40
C.5.	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	41
C.6.	Aset Tetap Lainnya	41
C.7.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	42
Aset Lainnya		43
C.8.	Aset Tak Berwujud	43
C.9.	Aset Lain-lain	44
C.10.	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	45
Kewajiban Jangka Pendek		46
C.11.	Utang kepada Pihak Ketiga	46
EKUITAS		46
C.12.	Ekuitas	46
D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	47
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	47
D.2.	Beban Pegawai	47
D.3.	Beban Persediaan	48
D.4.	Beban Barang dan Jasa	48
D.5.	Beban Pemeliharaan	49
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	50
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	50
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	51

E.1. Ekuitas Awal	51
E.2. Surplus (defisit) LO	51
E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	51
E.3.1 Koreksi Atas Reklasifikasi	51
E.3.2 Koreksi Nilai Aset Non Reklasifikasi	51
E.4. Transaksi Antar Entitas	51
E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	52
E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar	52
E.5. Ekuitas Akhir	52

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Jl. Janti No. 66 Banguntapan Bantul - DI Yogyakarta 55198
Telp. (0274) 520502 Fax. (0274) 581675 email : jogjakarta@ptun.org

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan pada 31 Desember Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bantul, Januari 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

BUDI SURYANA, S.H.
NIP.196702131988031002

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 77.978.003 atau mencapai 771 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 10.119.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp 6.742.071.966 atau mencapai 66 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 6.967.675.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 48.760.756.818, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 9.851.450; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 48.750.905.368; Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 152.690 dan Rp 48.760.604.128.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 9.406.000, sedangkan

jumlah beban operasional adalah sebesar Rp 7.056.362.011 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (7.046.956.011), Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp 0 dan surplus sebesar Rp 68.572.003 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp (6.978.384.008).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp 48.760.604.128 dikurangi defisit-LO sebesar Rp (6.978.384.008) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 16.283.817 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 6.681.462.713 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp 48.479.966.650.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

No	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH)	% REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH)	% REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	10.119.000	77.978.003	67.859.003	771	0	10.169.000	10.169.000	0,00
	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	10.119.000	77.978.003	67.859.003	771	0	10.169.000	10.169.000	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	10.119.000	77.978.003	67.859.003	771	0	10.169.000	10.169.000	0,00
B.	BELANJA								

Belanja Pegawai	5.391.327.000	5.187.168.606	(204.158.394)	96	6,380,327,000	5.213.923.689	(1.166.403.311)	82
Belanja Barang	1.417.848.000	1.401.116.360	(16.731.640)	99	1.567.177.000	1.454.442.468	(112.734.532)	93
Belanja Modal	158.500.000	153.787.000	(4.713.000)	97	50.500.000	50.500.000	0	100,00
JUMLAH BELANJA	6.967.675.000	6.742.071.966	(225.603.034)	97	7.998.004.000	6.718.866.157	(1.279.137.843)	84
C PEMBIAYAAN				0				0

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini*

NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA NERACA PER 31 Desember 2023 (dalam satuan Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	3	5
ASET				
Aset Lancar				
Persediaan	9.640.450	9.851.450	(211.000)	(2,14)
Jumlah Aset Lancar	9.640.450	9.851.450	(211.000)	(2,14)
Aset Tetap				
Tanah	39.517.834.000	39.517.834.000	0	0
Peralatan dan Mesin	3.843.636.060	3.777.499.060	66.137.000	1,75
Gedung dan Bangunan	10.777.885.354	10.768.175.354	9.710.000	0,09
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	9.710.000	(9.710.000)	(100)
Aset Tetap Lainnya	15.033.978	15.033.978	0	0
AKUMULASI PENYUSUTAN	(5.692.904.506)	(5.337.347.024)	(355.557.482)	6,66
Jumlah Aset Tetap	48.461.484.886	48.750.905.368	(289.420.482)	(0,59)
Aset Lainnya				
Aset tak Berwujud	100.315.000	100.315.000	0	0
Aset Lain-Lain	154.981.500	154.981.500	0	0
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(246.296.500)	(255.296.500)	9.000.000	(3,53)
Jumlah Aset Lainnya	9.000.000	0	9.000.000	
Jumlah Aset	48.480.125.336	48.760.756.818	(280.631.482)	(0,58)
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek				
Utang kepada Pihak Ketiga	158.686	152.690	5.996	3,93
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	158.686	152.690	5.996	3,93
Jumlah Kewajiban	158.686	152.690	5.996	3,93

EKUITAS				
Ekuitas	48.479.966.650	48.760.604.128	(280.637.478)	(0,58)
Jumlah Ekuitas	48.479.966.650	48.760.604.128	(280.637.478)	(0,58)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	48.480.125.336	48.760.756.818	(280.631.482)	(0,58)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	Jumlah		Kenaikan (penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Kegiatan Operasional				
Pendapatan				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	9.406.000	10.169.000	(763.000)	(7,503)
Jumlah Pendapatan (A)	9.406.000	10.169.000	(763.000)	(7,503)
Beban				
Beban Pegawai	5.187.168.606	5.213.923.689	(26.755.083)	(0,513)
Beban Persediaan	58.684.225	37.756.350	20.927.875	55,429
Beban Barang dan Jasa	621.291.379	690.149.569	(68.858.190)	(9,977)
Beban Pemeliharaan	610.016.514	624.970.989	(14.954.475)	(2,393)
Beban Perjalanan Dinas	111.341.238	90.624.469	20.716.769	22,86
Beban Penyusutan dan Amortisasi	467.860.049	499.715.430	(31.855.381)	(6,375)
Jumlah Beban (B)	7.056.362.011	7.157.140.496	(100.778.485)	(1,408)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional (C=A-B)	(7.046.956.011)	(7.146.971.496)	100.015.485	(1,399)
Kegiatan Non Operasional	0	0	0	0
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	68.572.003	0	68.572.003	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	68.572.003	0	68.572.003	
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL LAINNYA	68.572.003	0	68.572.003	0
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	(6.978.384.008)	(7.146.971.496)	168.587.488	(2,359)

POS LUAR BIASA	0	0	0	0
Beban Luar Biasa	0	0	0	0
Jumlah Pos Luar Biasa	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT – LO	(6.978.384.008)	(7.146.971.496)	168.587.488	(2,359)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	KENAIKAN/PEN URUNAN	%
1	2	3	4	5
Ekuitas Awal	48.760.604.128	48.930.932.467	(170.328.339)	-
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(6.978.384.008)	(7.146.971.496)	168.587.488	-
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	16.283.817	0	16.283.817	-
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	9.000.000	0	9.000.000	-
Selisih Revaluasi Aset	0	0	0	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	7.283.817	0	7.283.817	-
Transaksi Antar Entitas	6.681.462.713	6.976.643.157	(295.180.444)	-
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	(280.637.478)	(170.328.339)	(110.309.139)	-
Ekuitas Akhir	48.479.966.650	48.760.604.128	(280.637.478)	-

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2022 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- m. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- n. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- o. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
- r. Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan S-31/PB/PB.6/2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2023 (Unaudited)

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta merupakan satuan kerja yang mempunyai tupoksi Menerima, Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka di bawah Mahkamah Agung RI, dan berlokasi di Jl. Janti No. 66 Banguntapan, Bantul. sebagai satuan kerja pemerintah tentunya juga memiliki kewajiban sebagai entitas pelaporan akuntansi penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam bentuk Laporan Keuangan yang akuntabel dan transparan.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah "TERWUJUDNYA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA YANG AGUNG". Visi dimaksud bermakna sebagai berikut: menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
2. Memberikan Dukungan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya sesuai visi dan misi yang telah ditentukan membuat beberapa langkah-langkah strategis yang tercakup dalam program utama 2020-2024 sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Program utama tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk beberapa kegiatan pokok, sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara baru.
2. Penyelesaian sisa perkara.
3. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
4. Penyelesaian kelengkapan berkas banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
5. Penyampaian Pemberitahuan Pemanggilan Sidang.
6. Penyampaian Pemberitahuan Relas putusan .
7. Pelaksanaan diklat teknis non yudisial.
8. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
9. Tindak lanjut temuan yang masuk.
10. Publikasi proses penyelesaian perkara.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau

dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah

berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 6.967.675.000. Selama periode berjalan, Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2023	
	DIPA ANGGARAN AWAL	DIPA ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan PNBPN	10.119.900	10.119.900
Jumlah Pendapatan	10.119.900	10.119.900
Belanja		
Belanja Pegawai	6.380.327.000	5.391.327.000
Belanja Barang	1.417.848.000	1.417.848.000
Belanja Modal	15.000.000	158.500.000
Jumlah Belanja	7.813.175.000	6.967.675.000

B.1. Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Negara Rp
77.978.003*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 77.978.003. Pendapatan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berasal dari Pendapatan Sewa tanah, Gedung dan Bangunan dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Estimasi pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
	Pendapatan			
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	10.119.000	9.406.000	92,95
2	Pendapatan Dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	68.572.003	0
	Total Pendapatan	10.119.000	77.978.003	770,61

Realisasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan pada 31 Desember TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp. 763.000 atau (7,5) persen dibandingkan TA 2022.

Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa rumah dinas yang tidak termanfaatkan. Sedangkan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin didapatkan dari hasil lelang BMN yang rusak berat dan telah dihapuskan dari neraca.

Perbandingan realisasi PNBPN TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2023	2022	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	7.342.000	7.397.000	(55.000)	(0,74)
	Total Pendapatan	7.342.000	7.397.000	(55.000)	(0,74)

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja Negara
: Rp
6.742.071.966*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta per 31 Desember TA 2023 adalah sebesar Rp. 6.742.071.966 atau sebesar 97% dari anggaran senilai Rp. 6.967.675.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 31 Desember TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2023

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2023		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	5.391.327.000	5.187.168.606	97
Belanja Barang	1.417.848.000	1.401.116.360	96
Belanja Modal	158.500.000	153.787.000	99
Total Belanja	6.967.675.000	6.742.071.966	97

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 23.205.809 atau sebesar 0,34 persen dari realisasi periode yang sama tahun lalu. Hal ini disebabkan antara lain:

Meningkatnya Belanja Modal yang direalisasikan untuk belanja peralatan dan mesin yang berupa AC, Printer, dan furniture.

Perbandingan realisasi belanja 31 Desember TA 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	5.187.168.606	5.213.923.689	(26.755.083)	(0,51)
Belanja Barang	1.401.116.360	1.454.442.468	(53.326.108)	(3,66)
Belanja Modal	153.787.000	50.500.000	103.287.000	204,52
Total Belanja	6.742.071.966	6.718.866.157	23.205.809	0,34

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp
5.187.168.606*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta per 31 Desember TA 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 5.187.168.606 dan Rp 5.213.923.689.

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2023 mengalami penurunan sebesar (26.755.083) atau sebesar (0,51) persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2022. Hal ini disebabkan mutasi keluar beberapa pegawai.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.188.130.666	5.214.108.748	(25.978.082)	(0,49)
Jumlah Belanja Kotor	5.188.130.666	5.214.108.748	(25.978.082)	(0,49)
Pengembalian Belanja Pegawai	962.060	185.059	777.001	419,86

Jumlah Belanja	5.187.168.606	5.213.923.689	(26.755.083)	(0,51)
----------------	---------------	---------------	--------------	--------

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja Barang
: Rp
1.401.116.360*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta per 31 Desember TA 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 1.401.116.360 dan Rp 1.454.442.468.

Realisasi Belanja Barang 31 Desember TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp (53.326.108) atau (3,66) persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain karena:

1. Turunnya nilai belanja sewa rumah bagi hakim yang tidak mendapatkan rumah dinas, karena mutasi keluar beberapa hakim;
2. Pembayaran tagihan listrik diambil alih oleh Eselon I
3. Turunnya nilai perawatan kendaraan dinas akibat dari penghapusan kendaraan dinas;

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	597.436.650	518.666.975	78.769.675	15,18
Belanja Barang Non Operasional	9.779.000	1.335.000	8.444.000	632,50
Belanja Persediaan	60.055.250	48.957.750	11.097.500	22,66
Belanja Jasa	14.069.733	180.750.635	(166.680.902)	(92,21)
Belanja Pemeliharaan	608.434.489	614.107.639	(5.673.150)	(0,92)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	111.341.238	90.624.469	20.716.769	22,86
Jumlah Belanja Kotor	1.401.116.360	1.454.442.468	(53.326.108)	(3,66)
Pengembalian Belanja Barang	0	0	0	0
Jumlah Belanja	1.401.116.360	1.454.442.468	(53.326.108)	(3,66)

B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi
Belanja Modal:
Rp. 153.787.000*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp 153.787.000 dan Rp 50.500.000.

Realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 103.287.000 atau sebesar 204,52 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain: karena adanya tambahan alokasi belanja modal berupa peralatan dan mesin.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	153.787.000	50.500.000	103.287.000	204,52
Total Belanja Netto	153.787.000	50.500.000	103.287.000	204,52

*Realisasi
Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin: Rp.
153.787.000*

B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp 153.787.000, mengalami kenaikan sebesar 103.287.000 atau sebesar 204,52 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp 50.500.000. Hal ini disebabkan antara lain: karena adanya tambahan alokasi belanja modal berupa peralatan mesin.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Komputer Unit	0	40.500.000	(100)
Printer	15.000.000	10.000.000	50
AC	69.125.000	0	100
Credensa Kabinet	11.476.000	0	100
Sice	29.326.000	0	100

PABX	28.860.000	0	100
JUMLAH BELANJA	153.787.000	50.500.000	204,52

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp 9.640.450

Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 9.640.450 dan Rp 9.851.450.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1. Persediaan

Persediaan: Rp 9.640.450

Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 9.640.450 dan Rp. 9.851.450. Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 31 Desember TA 2023 dan 2022

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
1	Barang Konsumsi	9.640.450	9.851.450
	Total	9.640.450	9.851.450

Aset Tetap

*Aset Tetap: Rp
48.461.484.886*

Saldo Aset Tetap Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 48.461.484.886 dan 48.750.905.368.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Aset Tetap Lainnya.

C.2.Tanah

*Tanah:
Rp39.517.834.000*

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 39.517.834.000 dan Rp. 39.517.834.000.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rincian Mutasi Tanah

(dalam satuan Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	39.517.834.000
Mutasi Tambah	
Revaluasi Aset Tetap	0
Mutasi Kurang	
...	0
Saldo per 31 Desember 2023	39.517.834.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
Nilai Buku 31 Desember 2022	39.517.834.000

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Tanah TA 2022

(dalam satuan Rupiah)

No.	Luas (m ²)	Lokasi	Nilai
1	1.198	Pilahan	3.441.214.000
2	1.198	Wonocatur	7.670.480.000

3	3.500	Jl. Janti No. 66	28.406.140.000
Jumlah			39.517.834.000

C.3.Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp
3.843.636.060*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 3.843.636.060 dan Rp 3.777.499.060

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam satuan Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	3.777.499.060
Mutasi Tambah	
Pembelian	153.787.000
Transfer Masuk	19.850.000
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	0
Penghentian aset dari penggunaan	87.650.000
Saldo per 31 Desember 2023	3.843.636.060
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(3.465.122.087)
Nilai Buku 31 Desember 2022	378.513.973

Mutasi tambah peralatan dan mesin antara lain adalah sebagai berikut:

- Pembelian 1 buah Buffet Credensa senilai Rp 11.476.000
- Pembelian 2 set sice/sofa senilai Rp 29.326.000
- Pembelian 7 unit AC Split senilai Rp 25.300.000

- d. Pembelian 1 unit AC Portable senilai Rp 23.875.000
- e. Pembelian 3 unit AC Split senilai Rp 19.950.000
- f. Pembelian 1 set PABX senilai Rp 28.860.000
- g. Pembelian 3 buah printer senilai Rp 15.000.000

Transfer Masuk dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung senilai Rp 19.850.000 berupa mesin scanner.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusunannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.4. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp
10.777.885.354*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 10.777.885.354 dan Rp. 10.768.175.354.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Gedung dan Bangunan

(dalam satuan Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	10.768.175.354
Mutasi Tambah	
Penambahan	9.710.000
Mutasi Kurang	
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	
Saldo per 31 Desember 2023	10.777.885.354
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(2.227.782.419)
Nilai Buku 31 Desember 2023	8.550.102.935

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.5. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp. 9.710.000.

Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tahun 2023 telah dilakukan koreksi pencatatan aset yang kemudian dimasukkan ke dalam aset Gedung dan Bangunan.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam satuan Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	9.710.000
Mutasi Tambah	
...	0
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan	9.710.000
Saldo per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
Nilai Buku 31 Desember 2023	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.6. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp
15.033.978*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 15.033.978 dan Rp. 15.033.978.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap Lainnya

(dalam satuan Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	15.033.978
Mutasi Tambah	
TM dari MA RI	0
Mutasi Kurang	
...	...
Saldo per 31 Desember 2023	15.033.978
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
Nilai Buku 31 Desember 2023	15.033.978

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp
[5.692.904.506]*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp (5.692.904.506) dan Rp (5.337.347.024) .

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3.843.636.060	3.465.122.087	378.513.973
2	Gedung dan Bangunan	10.777.885.354	2.227.782.419	8.550.102.935
3	Aset Tetap Lainnya	15.033.978	0	15.033.978
	Jumlah	14.636.555.392	5.692.904.506	8.943.650.886

Aset Lainnya: Rp
9.000.000

Aset Lainnya

C.8.Aset Tak Berwujud

*Aset tak
Berwujud :*
Rp 100.315.000

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 100.315.000 dan Rp. 100.315.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun mutasi transaksi ATB per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud

(dalam satuan Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	100.315.000
Mutasi Tambah	
....	0
Mutasi Kurang	
.....	0
Saldo per 31 Desember 2023	100.315.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(91.315.000)
Nilai Buku per 30 September 2023	9.000.000

Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Terdapat koreksi atas reklasifikasi Aset Tak Berwujud yang menyebabkan pengurangan akumulasi penyusutan dibanding nilai buku pada awal TA 2023.

C.9.Aset Lain-lain

Aset Lain-lain :
Rp 154.981.500

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 154.981.500 dan Rp. 154.981.500. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Rincian Aset Lain-Lain

(dalam satuan Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	154.981.500
Mutasi Tambah	
....	0
Mutasi Kurang	
.....	0
Saldo per 31 Desember 2023	154.981.500
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(154.981.500)
Nilai Buku per 30 September 2023	0

C.10. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
lainnya : Rp
(246.296.500)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp (246.296.500) dan Rp. (255.296.500) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Aset tak Berwujud	100.315.000	100.315.000
2	Aset Lain-lain	154.981.500	154.981.500
	Nilai perolehan Aset Lainnya	255.296.500	255.296.500
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(246.296.500)	(255.296.500)
	Nilai buku Aset Lainnya	9.000.000	0

Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek
Rp 158.686

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 158.686 dan Rp 152.690.

C.11. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada
Pihak Ketiga:
Rp 158.686

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 158.686 dan Rp. 152.690. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	158.686	(Akrual)
	Jumlah	158.686	

Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar merupakan belanja langganan telepon bulan Desember yang belum dibayarkan .

Ekuitas: Rp
48.479.966.650

EKUITAS

C.12. Ekuitas

Ekuitas:Rp
48.479.966.650

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 48.479.966.650 dan Rp 48.760.604.128. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
Pnbp : Rp*
9.406.000

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 9.406.000 dan Rp 10.169.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Naik(turun)%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	9.406.000	10.169.000	(7,503)
	Total Pendapatan	9.406.000	10.169.000	(7,503)

D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai
: Rp*
5.187.168.606

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 5.187.168.606 dan Rp 5.213.923.689. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Naik(turun)%
-----	--------	------	------	--------------

1.	Beban Pegawai	5.187.168.606	5.213.923.689	(0,513)
	Total	5.187.168.606	5.213.923.689	(0,513)

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan : Rp
58.684.225*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 58.684.225 dan Rp 37.756.350. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2023 dan 2022

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Naik(turun)%
1.	Beban Persediaan Konsumsi	58.684.225	37.756.350	55,429
	Total	58.684.225	37.756.350	55,429

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa : Rp
621.291.379*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 621.291.379 dan Rp 690.149.569. Beban barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena pengalihan beban langganan listrik yang semula dibebankan ke satker menjadi beban di pusat serta berakhirnya masa pandemi Covid 19 sehingga beban penanganan pandemi menjadi berkurang.

Rincian Beban Barang dan jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Jasa per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun) %
Beban Keperluan perkantoran	525.355.150	453.869.750	15,75
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.221.500	4.116.700	2,54
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	67.860.000	46.728.000	45,22
Beban Barang Operasional Lainnya	0	13.465.025	(100)
Beban Bahan	449.000	1.335.000	(66,36)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	9.330.000	0	100
Beban Barang Operasional- Penanganan Pandemi Covid 19	0	487.500	(100)
Beban Langganan Listrik	0	122.422.661	(100)
Beban Langganan Telpon	1.855.729	2.009.933	(7,67)
Beban Sewa	12.220.000	41.380.000	(70,46)
Beban Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	0	4.335.000	(100)
Total Beban Barang dan Jasa	621.291.379	690.149.569	(9,977)

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp 610.016.514*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 610.016.514 dan Rp 624.970.989. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan Beban Pemeliharaan pada TA 2023 adalah Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	353.693.858	367.897.171	29,165
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	109.494.550	109.017.311	93,556
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	145.246.081	137.193.157	3,563
Beban Persediaan untuk bahan Pemeliharaan	1.582.025	10.863.350	(97,491)
Total Beban Pemeliharaan	610.016.514	624.970.989	29,715

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp
111.341.238*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 111.341.238 dan Rp 90.624.469. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas dikarenakan banyak kegiatan dinas sudah dilakukan secara luring, setelah pandemi Covid selesai.

Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)%
Beban Perjalanan Biasa	108.791.238	89.724.469	21,25
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	2.550.000	900.000	183,33
Total Beban Perjalanan Dinas	111.341.238	90.624.469	22,86

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
: Rp
467.860.049*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 467.860.049 dan Rp 499.715.430. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	148.716.466	168.848.602	(11,92)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	319.143.583	330.600.328	(3,465)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak digunakan	0	266.500	(100)
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	467.860.049	499.715.430	(6,375)

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal
Rp
48.760.604.128*

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 48.760.604.128 dan Rp 48.930.932.467.

E.2. Surplus (defisit) LO

*Surplus
(Defisit) LO Rp
(6.978.384.008
)*

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp (6.978.384.008) dan Rp (7.146.971.496). Surplus (Defisit) merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

*Koreksi Yang
Menambah/
Mengurangi
Ekuitas: Rp
16.283.817*

Nilai Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 16.283.817 dan Rp 0.

E.3.1 Koreksi Atas Reklasifikasi

*Koreksi Atas
Reklasifikasi:
Rp 9.000.000*

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 9.000.000 dan Rp 0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan reklasifikasi atas aset.

E.3.2 Koreksi Nilai Aset Non Reklasifikasi

*Koreksi Nilai
Aset Non
Reklasifikasi:
Rp 7.283.817*

Koreksi Nilai Aset Non Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 7.283.817 dan Rp 0.

E.4. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas Rp
6.681.462.713*

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 6.681.462.713 dan Rp 6.976.643.157. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Transaksi Antar Entitas
Per 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	2023	2022
Diterima dari Entitas Lain	(77.978.003)	(10.169.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	6.742.071.966	6.718.866.157
Transfer Masuk	17.368.750	285.314.750
Transfer Keluar	0	0
Jumlah	6.681.462.713	6.976.643.157

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp 77.978.003 sedangkan DKEL sebesar Rp 6.742.071.966.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lainnya pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 17.368.750

No	Entitas Asal	Jenis	Nilai
1	Badan Urusan Administrasi	Mesin Scanner	17.368.750
Jumlah			17.368.750

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 0.

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp
48.479.966.650

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 48.479.966.650 dan Rp 48.760.604.128.